

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

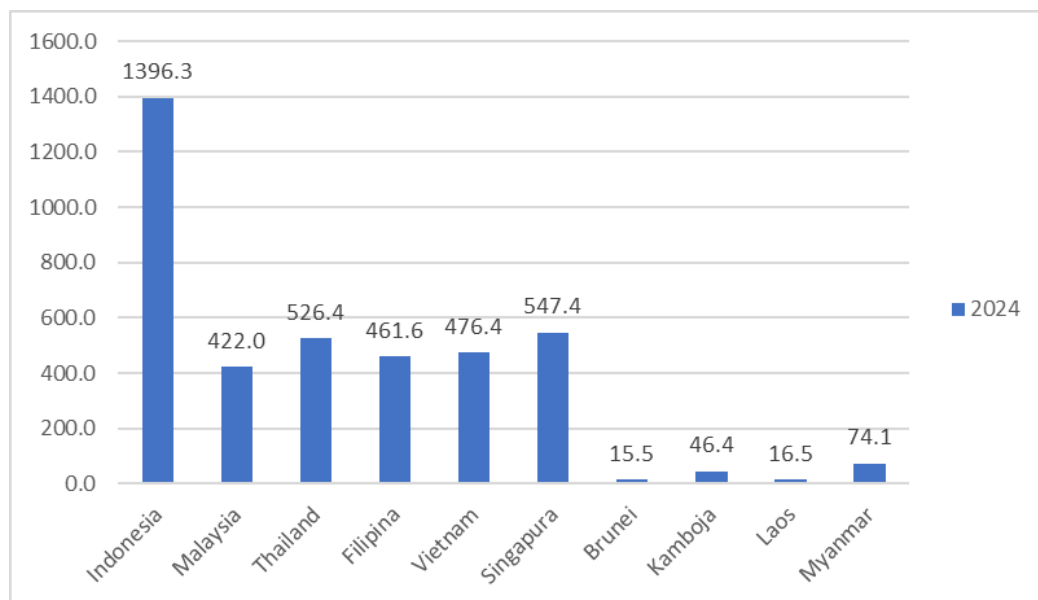
### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Auxiliadora (2024) Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur menggunakan indikator utama, yakni Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki potensi besar berupa kelimpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kekayaan ini merupakan modal penting yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan populasi secara signifikan. Peningkatan kesejahteraan tersebut direfleksikan di tingkat nasional melalui pertumbuhan indikator ini, yang berujung pada kenaikan pendapatan per kapita. Secara definisi, indikator ekonomi makro tersebut adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Menurut Warkawani (2020), besaran Produk Domestik Bruto (PDB) yang dicapai suatu negara menawarkan sudut pandang penting untuk menilai kemampuan produksi output dalam merespons permintaan pasar. Selain itu, indikator ekonomi ini digunakan secara global sebagai pembanding standar hidup dan menjadi acuan fundamental oleh mayoritas negara di dunia untuk merencanakan dan merumuskan kebijakan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa data tersebut dinilai mengandung informasi komprehensif mengenai kondisi perekonomian nasional secara keseluruhan (Tamba et al., 2023).

Menurut data *World Bank*, negara-negara di kawasan ASEAN menunjukkan karakteristik yang serupa. Semua negara di ASEAN, kecuali Singapura,

diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Kelompok negara tersebut memiliki daya tarik kuat bagi investasi asing karena kekayaan alam yang melimpah dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai dengan tingkat upah buruh yang relatif rendah. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi utama masuknya modal internasional (Saputra et al., 2021).



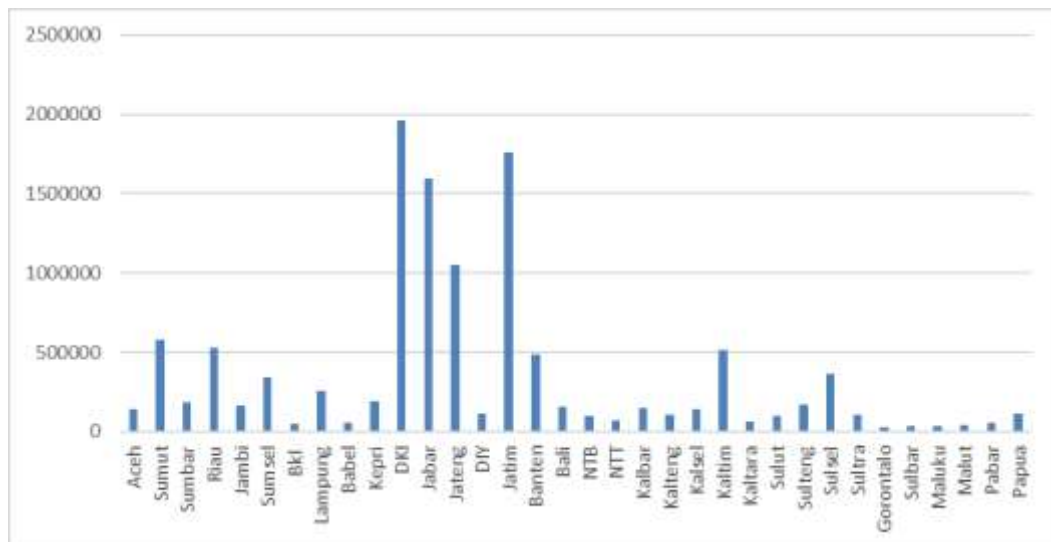
**Gambar 1.1**  
**PDB Negara-Negara di ASEAN Tahun 2024 (Miliar US\$)**

Sumber: *World Bank, 2025*

Berdasarkan gambar di atas data yang bersumber dari *World Bank* pada tahun 2024, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, yang ditunjukkan oleh tingginya nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2024, PDB Indonesia mencapai US\$ 1.396,3 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan negara berkembang ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan, Thailand mencatat PDB sebesar US\$ 526,4 miliar, diikuti oleh Filipina, Vietnam, dan Malaysia (yang memiliki PDB di bawah angka tersebut). Besaran ekonomi ini menjadikan Indonesia sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan di Asia Tenggara,

meskipun tantangan terkait pemerataan pendapatan dan pembangunan infrastruktur masih menjadi fokus utama.

Meskipun Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid secara nasional, terdapat isu struktural signifikan di tingkat regional. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per provinsi menunjukkan disparitas atau ketidakmerataan yang mencolok di 34 provinsi. Angka regional memperlihatkan konsentrasi aktivitas ekonomi yang terpusat di wilayah tertentu. Ketidakmerataan ini mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan nasional belum tersebar merata, yang dapat memicu kesenjangan pembangunan dan sosial. Berikut adalah data rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024 tersaji pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.2**  
**Rata-Rata PDRB Atas Dasar Harga Konstan 34 Provinsi Indonesia**  
**tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata PDRB 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Berdasarkan data tersebut, provinsi dengan rata-rata PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 1.960.659,016 miliar rupiah, sedangkan

provinsi dengan rata-rata PDRB terendah adalah Gorontalo, yaitu sebesar 30.481,782 miliar rupiah. Selama periode pengamatan, seluruh provinsi mengalami peningkatan nilai PDRB dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya pertumbuhan nilai produksi ekonomi di masing-masing daerah, meskipun dengan besaran yang berbeda. Tingginya PDRB DKI Jakarta didorong oleh konsentrasi penduduk yang besar, aktivitas industri dan jasa yang dominan, serta dukungan infrastruktur yang relatif lebih maju dibandingkan provinsi lain. Sebaliknya, rendahnya PDRB di Provinsi Gorontalo mencerminkan skala ekonomi yang lebih kecil, yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang relatif minim dan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas produksi dan kontribusi ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Teori produksi Cobb–Douglas adalah salah satu bentuk fungsi produksi yang paling umum diterapkan dalam berbagai studi empiris. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas pada tahun 1928 (Kida et al., 2025). Fungsi produksi Cobb–Douglas digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan proses produksi yang menghasilkan output dari input tenaga kerja (L) dan modal (K). Fungsi Cobb–Douglas memodelkan bagaimana perubahan stok modal akibat investasi memengaruhi output. Dengan melihat modal sebagai investasi fisik yang merujuk pada pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau menciptakan aset modal (*capital assets*) nyata yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa, fungsi ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi dapat meningkatkan produksi dan membantu mengukur *return to scale*, sehingga

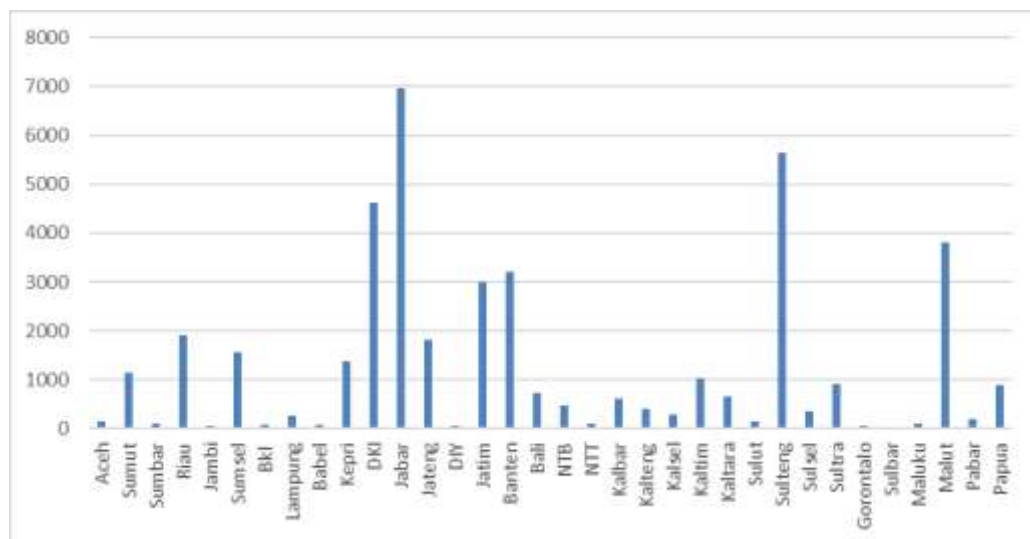
berguna dalam analisis pertumbuhan ekonomi (Atabayeva et al., 2024). Di sisi lain, tenaga kerja turut menentukan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa.

Investasi berperan fundamental sebagai faktor penggerak utama perekonomian suatu negara, memungkinkan pertumbuhan yang selaras dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Nilai penanaman modal, termasuk dari sumber asing, yang tinggi akan memberikan dampak positif signifikan, sementara nilai yang rendah akan menghasilkan dampak terbatas. Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas dan prospek perekonomian nasional, pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan aktivitas penanaman modal. Investasi memiliki peran strategis dalam memperbesar akumulasi modal yang menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan tersebut selanjutnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan volume investasi, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, sehingga menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.. Secara keseluruhan, lonjakan permintaan barang dan jasa akan meningkatkan kebutuhan modal para investor untuk membiayai proyek di area spesifik, sehingga memengaruhi aktivitas investasi secara luas (Liow et al., 2022).

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan salah satu jenis aliran modal yang dianggap memiliki tingkat stabilitas lebih tinggi dibandingkan modal lainnya, seperti investasi portofolio atau pinjaman luar negeri. Dalam konteks ini, Adi &

Syahlina (2020) berpendapat bahwa upaya pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan baru merupakan faktor penting bagi pembangunan ekonomi.

Berikut adalah data rata-rata Penanaman Modal Dalam Asing (PMA) tahun 2020-2024 untuk 34 provinsi di Indonesia:



**Gambar 1.3**

**Rata-Rata Realisasi PMA 34 Provinsi Indonesia Tahun 2020-2024 (Juta US\$)**

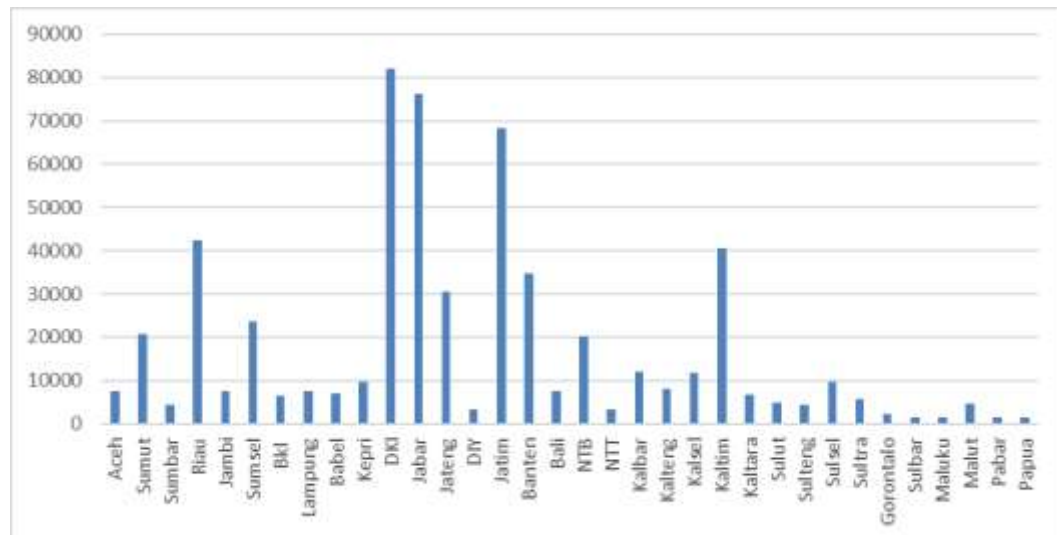
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Gambar 1.3 menunjukkan data rata-rata Penanaman Modal Asing (PMA) di 34 provinsi Indonesia selama periode 2020-2024. Dari seluruh provinsi, Jawa Barat secara konsisten menjadi wilayah dengan realisasi PMA tertinggi, rata-rata mencapai 6960.38 Juta US\$ pada tahun 2020-2024. Keunggulan investasi Jawa Barat didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai, statusnya sebagai pusat industri manufaktur terbesar dengan jaringan pasokan terpadu, dan pasar domestik yang sangat besar menjadi salah satu tujuan utama dan paling efisien bagi investasi asing. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Barat rata-rata mencapai 13,44 Juta US\$ selama 2020-2024 paling kecil dan hampir seluruhnya berasal dari sektor pangan, perkebunan, peternakan, dan industri makanan mendominasi PMA di Sulawesi

Barat namun, Indeks *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang tinggi menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien. ICOR merupakan rasio yang mengukur efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu menunjukkan seberapa besar tambahan investasi (modal) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Tingginya nilai ICOR mengindikasikan bahwa peningkatan investasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan pertumbuhan yang optimal, yang disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan data potensi sumber daya alam, serta regulasi dan kepastian hukum yang masih lemah (BPS, 2023).

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat struktur perekonomian nasional, investasi menjadi salah satu faktor kunci yang memiliki peran strategis. Sebagai salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi, arus penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang terus meningkat tidak hanya mencerminkan dinamika investasi yang sehat, tetapi juga menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki keyakinan kuat terhadap stabilitas makroekonomi, arah kebijakan pemerintah, serta prospek pertumbuhan jangka panjang di Indonesia. Peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara khusus mengindikasikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para pelaku ekonomi terhadap stabilitas dan prospek perekonomian Indonesia (Panelewen et al., 2020).

Investasi di tingkat daerah (pemerintah dan swasta) memiliki dua fungsi strategis: menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa masyarakat, sekaligus menambah kapasitas produksi daerah. Berikut adalah data rata-rata Penanaman Modal Dalam Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020-2024:



**Gambar 1.4**  
**Rata-Rata Realisasi Investasi PMDN 34 Provinsi Indonesia**  
**Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

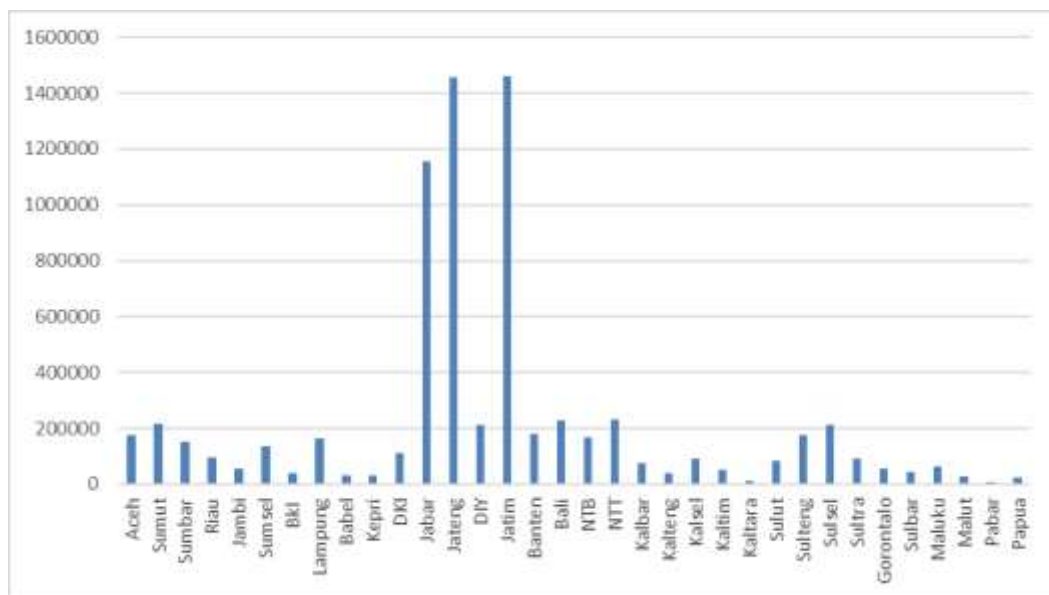
Pada Gambar 1.4 di atas menunjukkan data Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2020-2024, DKI Jakarta dengan nilai rata-rata mencapai 82098.14 miliar rupiah, disusul oleh Jawa Barat sebesar 76344.46 miliar rupiah pada tahun 2020-2024. Tingginya realisasi ini disebabkan oleh peran spesifik, Jakarta sebagai pusat finansial dan jasa menarik PMDN ke sektor non-riil seperti real estat, perdagangan, sedangkan Jawa Barat sebagai basis manufaktur terbesar menarik PMDN ke sektor riil (pabrik dan produksi). Keduanya didukung oleh infrastruktur maju dan pasar domestik yang besar. Disisi lain PMDN Provinsi Sulawesi Barat mencapai rata-rata 1373.12 miliar rupiah pada tahun 2020-2024.

Nilai tersebut termasuk kecil karena skala ekonomi regional yang kecil dan ketergantungan kuat pada sektor primer (pertanian/perkebunan) yang modalnya terbatas. Hambatan utamanya adalah infrastruktur logistik yang belum memadai dan biaya operasional yang tinggi, sehingga investor domestik besar cenderung mengalihkan modal ke provinsi tetangga seperti Sulawesi Tengah (smelter nikel) atau Sulawesi Selatan (pusat perdagangan dan jasa) yang menawarkan potensi *return* lebih besar.

Menurut Budihardjo (2020) jumlah tenaga kerja di suatu daerah akan meningkat seiring besarnya jumlah penduduk. Pertumbuhan populasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) asalkan didukung oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal. Sebaliknya, perkembangan ekonomi terhambat jika angkatan kerja tidak terserap baik. Dinamika ketenagakerjaan antarprovinsi sangat bervariasi karena faktor demografis. Populasi besar dengan pendidikan dan keterampilan memadai menjadi kunci peningkatan indikator ekonomi. Tingginya usia produktif menambah ketersediaan tenaga kerja dan kapasitas produksi. Kebutuhan akan tenaga kerja produktif juga meningkat seiring produksi, sebab peningkatan produktivitas pekerja akan secara langsung meningkatkan total produksi barang dan jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Industri Mikro dan Kecil (IMK) memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah karena kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjangkau lapisan masyarakat bawah. IMK berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang efektif dalam mendistribusikan pendapatan secara lebih merata serta mengurangi

kesenjangan antar kelompok pendapatan. Mengingat sebagian besar unit IMK merupakan usaha berbasis rumah tangga yang beroperasi di lingkungan tempat tinggal, sektor ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat lokal, terutama di daerah dengan keterbatasan akses industri besar. Oleh karena itu, IMK memerlukan dukungan pembinaan dan pendampingan yang konsisten, baik dari sisi permodalan, peningkatan kapasitas usaha, maupun akses pasar, agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Berikut adalah data tenaga kerja industri skala mikro dan kecil tahun 2020-2023 untuk 34 Provinsi di Indonesia:



**Gambar 1.5**  
**Rata-Rata Jumlah Tenaga Kerja IMK 34 Provinsi Indonesia**  
**Tahun 2020-2024 (Orang)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan Gambar 1.5, rata-rata jumlah tenaga kerja IMK di 34 provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja terbesar adalah Jawa Timur, yang terletak di Pulau Jawa, dengan rata-rata mencapai 1.458.659,4 orang, provinsi berikutnya adalah Jawa Tengah dengan rata-rata

1.455.532 orang selama 2020-2024. Konsentrasi tenaga kerja IMK di Jawa dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, urbanisasi tinggi, serta dominasi sektor industri dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, Provinsi Papua Barat mencatat jumlah tenaga kerja IMK paling rendah, yakni rata-rata sekitar 8.535,4 orang selama periode 2020-2024. Rendahnya angka tenaga kerja IMK di Papua Barat didorong oleh jumlah penduduk yang kecil dan tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, akses yang sulit, dan terbatasnya peluang kerja formal. Kontras ini jelas menunjukkan adanya ketimpangan distribusi tenaga kerja IMK dan kapasitas ekonomi antarwilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dinamika ini menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan SDM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di seluruh negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi PDRB, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan jumlah tenaga kerja IMK. Ketiga faktor tersebut ada yang menunjukkan adanya kesenjangan, sementara yang lain menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam kegiatan ekonomi di setiap provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **Pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024?
3. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja

IMK secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.

3. Untuk mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Kebaharuan utama dalam penelitian ini terletak pada penggunaan variabel Tenaga Kerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), sebuah pendekatan yang belum banyak digunakan oleh studi-studi terdahulu mengenai determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap PDRB, sehingga temuan ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian empiris mengenai peran sektor industri mikro dan kecil dalam pertumbuhan ekonomi regional.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana penambah wawasan dan pemahaman lebih mendalam khususnya tentang Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Jumlah Tenaga Kerja IMK terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2020-2024.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademika khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan sekaligus rekomendasi mengenai pengaruh variabel di atas khususnya kebijakan dalam membangun perekonomian Indonesia.

4. Bagi Peneliti

Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan perbandingan khususnya dalam hal mempelajari masalah investasi dan pertumbuhan ekonomi.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.1.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari website resmi World Bank, Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian.

